

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang menghadapi permasalahan kemiskinan. Kemiskinan merupakan kondisi dimana suatu masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, papan dan pangan (Priseptian & Primandhana, 2022). Hal tersebut merupakan suatu permasalahan bagi Indonesia, karena sejatinya kemiskinan merupakan salah satu penghambat bagi suatu negara ataupun daerah untuk maju (Triono & Sangaji, 2023). Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan di Indonesia salah satunya pendidikan yang lemah, sumber daya manusia yang kurang mampu bersaing serta keterbatasan lapangan pekerjaan (Itang, 2015).

Salah satu syarat utama dalam mengentaskan permasalahan kemiskinan di berbagai negara yaitu melalui pertumbuhan ekonomi (Jonaidi, 2012). Pertumbuhan ekonomi dapat terwujud dengan adanya pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan suatu sistem yang dibuat oleh pemerintah untuk menunjang pendapatan per kapita masyarakat menjadi meningkat dalam jangka panjang serta di imbangi dengan kondisi politik, sosial, ekonomi dan nilai nilai dalam masyarakat berubah menjadi lebih baik (Mulyani, 2007). Selain itu, menurut (Witjaksono, 2009) dalam pengertian luas, pembangunan ekonomi mengarah pada kebijakan dan program-program seperti kebijakan yang mengarah pada pengendalian inflasi, peningkatan kesempatan kerja, memberikan atau menyediakan berbagai layanan publik dalam bentuk

infrastruktur yang baik, serta kebijakan dan program yang secara eksplisit ditujukan pada perbaikan iklim usaha.

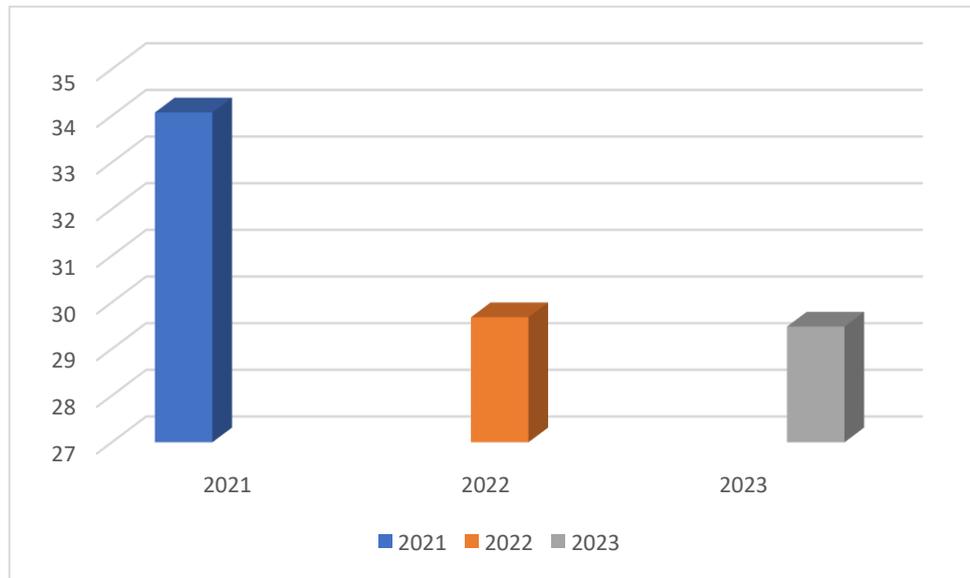
Berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam pembangunan ekonomi melalui kebijakan publik maupun program-program untuk mengentaskan permasalahan kemiskinan. Melihat daerah dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi di Indonesia saat ini, Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan Provinsi termiskin di pulau Jawa (Nabilawaty & Hutajulu, 2021). Hal tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah DIY dalam mengentaskan kemiskinan di daerahnya yang dimana pemerintah harus mampu menciptakan kebijakan publik yang efektif dan efisien atas hajat hidup orang banyak.

Di Kota Yogyakarta, ketimpangan cenderung disebabkan oleh faktor ketimpangan kualitas pekerjaan yaitu kurang terampil dalam suatu pekerjaan sehingga menyebabkan orang tersebut berada pada pekerjaan dengan produktivitas dan upah yang rendah. Hal ini menyebabkan orang tersebut sulit naik kelas sosial. Kondisi ini juga berdampak pada ketidakmampuan masyarakat Kota Yogyakarta untuk turut andil dalam pergerakan ekonomi di Kota Yogyakarta sehingga pendapatan atau kekayaan hanya terkonsentrasi pada sekelompok kecil masyarakat yang memiliki *hardskill* dan *softskill* yang lebih mumpuni.

Persoalan-persoalan yang menjadi masalah publik harus mendapat perhatian dan penanganan dari pemerintah selaku pelayan masyarakat. Kondisi tersebut mengharuskan pemerintah untuk mengambil keputusan dan

merencanakan tindakan-tindakan secara bijak. Salah satu upaya nya adalah dengan pembuatan kebijakan.

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Miskin Kota Yogyakarta Tahun 2021-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) DIY, 2023

Jika dilihat dari jumlah dan persentase penduduk miskin di Kota Yogyakarta pada tahun 2021-2023 sudah mengalami penurunan. Pada tahun 2021 sebesar 34,07%, pada tahun 2022 mengalami penurunan secara signifikan sebesar 29,68%, disusul pada tahun 2023 menjadi 29,48%. Hal tersebut dikarenakan DIY memberikan banyak contoh beberapa bidang program dari pemerintah untuk masyarakat, diantaranya yakni Program Gandeng Gendong, Belabeli, Program *One Village One Product* (OVOP) dan lain sebagainya. Diantara program yang terdapat di DIY pada dasarnya memiliki tujuan dan sasaran yang tepat bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Namun, dikarenakan adanya pandemi Covid-19 angka kemiskinan kembali naik dikarenakan banyak

dari kalangan masyarakat terhambat dalam melakukan aktivitasnya sehingga ekonomi menjadi terhambat.

Diantara berbagai program yang telah disebutkan di atas salah satu program yang cukup menunjang penurunan angka kemiskinan di Kota Yogyakarta yaitu Program Gandeng-Gendong. Program Gandeng-Gendong adalah program yang telah dikembangkan pemerintah Kota Yogyakarta yang berfokus untuk memberdayakan masyarakat melalui pemanfaatan potensi lokal seperti kuliner dan produk kerajinan (Dari et al., 2022). Pemkot Yogyakarta melahirkan Program Gandeng-Gendong untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan peran dari 5 elemen (*Collaborative governance*) yaitu Pemerintah, Korporasi, Kampus, Kampung, dan Komunitas (Putra et al., 2020). Kelima elemen tersebut harus mampu berkolaborasi dalam mewujudkan tujuan program yang telah dikembangkan dengan memaksimalkan perannya masing-masing sesuai dengan peraturan yang telah dibuat.

Keberhasilan pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengurangi angka kemiskinan dapat dilihat berdasarkan data di atas. Tingkat kemiskinan kota Yogyakarta telah turun secara berkala dari tahun ke tahun dengan jumlah yang cukup signifikan. Selain itu, menurut penelitian (Putra et al., 2020) pada saat Covid-19 melanda Indonesia, penurunan kemiskinan pada bidang pangan di Kota Yogyakarta juga berhasil turun dengan angka sebelumnya berjumlah 5,56% menjadi 1,05%. Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta dengan cara menggandeng pihak swasta (Gojek) sebagai sarana transportasi untuk membeli produk yang telah dipasarkan oleh masyarakat yang

berjualan melalui media online. Selain itu, Pemkot Yogyakarta juga memberikan keringanan biaya pengiriman agar masyarakat tidak merasa terbebani.

Tugas dari pemerintah yaitu mengelola suatu daerah agar lebih bernilai (Handoyo, 2012). Keberhasilan program Gandeng-Gendong dalam mencapai tujuannya untuk mengentaskan kemiskinan tidak luput dari peran *collaborative governance* atau *stakeholders* dalam penerapannya (Iza & Nurhaeni, 2021). Program tersebut merupakan program yang inovatif sehingga mampu menempatkan Kota Yogyakarta sebagai kota terbaik pada tingkat nasional tahun 2020 pada acara Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD).

Program Gandeng Gendong diperkuat dengan 4 landasan hukum utama yaitu Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta tahun 2017-2022, Rencana Strategis BAPPEDA Kota Yogyakarta tahun 2017- 2022, Peraturan Daerah No. 23 Tahun 2009 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Yogyakarta, dan Peraturan Walikota Tentang Program Gandeng-Gendong No. 23 Tahun 2018.

Pada saat ini *collaborative governance* sangat diperlukan dalam pembangunan ekonomi karena setiap *stakeholders* pasti mempunyai visi dan misi yang sama untuk mengentaskan berbagai probelematika kehidupan salah satunya permasalahan kemiskinan (Putra et al., 2020). Pada penelitian sebelumnya yang ditulis oleh (Basuki & Triputro, 2022) dalam Program Gandeng-Gendong pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan Kerjasama

dengan Lembaga sosial bidang keagamaan yaitu Baznas, yang dimana dalam *collaborative governance* tersebut memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat dengan membekali berbagai pelatihan serta kepastian lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Munculnya Program Gandeng-Gendong terjadi karena Kota Yogyakarta memiliki jumlah angka kemiskinan yang tinggi di Indonesia (Nugraha & Angeningsih, 2022). Dalam Program Gandeng-Gendong ini pemerintah mencoba menurunkan angka kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan potensi lokal. Konsep dalam Program Gandeng-Gendong yaitu mengedepankan kerjasama yang artinya seluruh stakeholders harus terlibat dalam mengetaskan permasalahan kemiskinan yang terjadi di Kota Yogyakarta. Konsep kolaborasi yang diimplementasikan oleh pemerintah daerah dalam pelayanan publik akan memiliki kualitas yang lebih baik, menjangkau masyarakat luas hingga ke berbagai wilayah pelosok sehingga perbaikan kesejahteraan rakyat akan terwujud dengan sendirinya (Rozikin et al., 2020). Oleh karena itu, pada penelitian ini peneliti mengangkat judul “Kolaborasi Pengentasan Kemiskinan melalui Program gandeng Gendong di Kota Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Program Gandeng-Gendong di Kota Yogyakarta merupakan suatu inovasi yang diluncurkan oleh pemerintah untuk mengentaskan angka kemiskinan. Pada program Gandeng-Gendong ini mengedepankan nilai kerjasama (*collaborative governance*) dari 5 elemen yaitu Pemerintah, Korporasi,

Kampus, Kampung, dan Komunitas dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui Bagaimana kolaborasi pengentasan kemiskinan melalui program Gandeng-Gendong di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kolaborasi yang dilakukan *stakeholders* dalam membantu mengurangi angka kemiskinan pada program Gandeng-Gendong di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan untuk menambah wawasan atau pengetahuan dan kontribusi serta menambah pemahaman bagi yang membaca terkait dengan kolaborasi pemerintah pada Program Gandeng Gendong dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah pembelajaran dan penerapan ilmu pengetahuan di bidang kebijakan publik.

**E. Tinjauan Pustaka
Peneletian Terdahulu**

No	Nama Penulis	Judul	Hasil Temuan
1	(Darwis et al., 2019) (https://www.researchgate.net/publication/335006045_Peran_Pemerintah_dalam_Kolaborasi_Stakeholders_pada_Pelaksanaan_Program_Corporate_Social_Responsibility_(CSR))	Peran Pemerintah dalam Kolaborasi <i>Stakeholders</i> pada Pelaksanaan Program <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	Berdasarkan hasil penelitian ini, pemerintah turut berkontribusi dengan memfasilitasi berbagai kebutuhan pelaksanaan program Rumah Inspirasi seperti pemberian ijin serta fasilitas untuk sosialisasi. Adapun aktor kolaborasi pemerintah yang terlibat adalah Kelurahan Dangdeur, Kecamatan Subang dan Dinas Lingkungan Hidup (LBH).
2	(Akbar & Humaedi, 2020) (https://www.researchgate.net/publication/343634145_PERAN_CSR_DALAM_UPAYA_MENGATASI_PANDEMI_COVID-19)	Peran CSR dalam Mengatasi Pandemi Covid-19	Berdasarkan hasil penelitian ini, PT. Pertamina sebagai salah satu unsur dari <i>Stakeholders</i> dalam CSR memaksimalkan perannya untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dengan menyalurkan berbagai bantuan seperti alat-alat Kesehatan. Selain itu, perusahaan juga memberikan peluang pekerjaan kepada masyarakat kehilangan pekerjaannya akibat Covid-19.
3	(Agustina, 2012) (https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-	Peran <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) PT. Pertamina Hulu Energy WMO	Menurut hasil penelitian ini, bahwa wujud tanggung jawab sosial dari PT. Pertamina Hulu <i>Energy WMO</i> kepada masyarakat yaitu

	akuntansi/article/view/307)	dalam Pengembangan Masyarakat di Kecamatan Gresik	dengan meningkatkan kualitas Pendidikan dan Kesehatan, mendorong UMKM, pelestarian lingkungan dan perbaikan fasilitas umum.
4	(Rubiono et al., 2022) (https://www.researchgate.net/publication/359211908_Peran_Serta_Perguruan_Tinggi_dalam_Kepedulian_Bencana_Erupsi_Gunung_Semeru_Tahun_2021)	Peran Serta Perguruan Tinggi dalam Kepedulian Bencana Erupsi Gunung Semeru Tahun 2021	Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kampus merupakan salah satu elemen dari CSR turut menunjukkan peran nya dalam membantu masyarakat yang mengalami bencana erupsi gunung semeru pada tahun 2021. Adapun keterlibatan dari pihak kampus dalam bencana ini yaitu dengan melakukan penggalangan dana untuk korban bencana erupsi gunung semeru. Selanjutnya dana yang terkumpul diberikan kepada masyarakat yang terkena imbas dari erupsi gunung tersebut. Selain itu, Universitas PGRI Banyuwangi juga berkoordinasi dengan pihak terkait agar bantuan dapat tersalurkan dengan tepat sasaran.
5	(Oktini, 2007) (https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/244)	Peran Perguruan Tinggi, Pemerintah dan Investor dalam Membangun Wisata Pedesaan di Jawa Barat Sebagai Upaya Mengurangi Kemiskinan	Dalam penelitian menjelaskan bahwa kolaborasi yang dilakukan antar <i>stakeholders</i> memiliki peran masing-masing. Peran kampus yaitu mengembangkan

			sumber daya manusia, peran pemerintah dengan memfasilitasi infrastruktur yang baik untuk akses menuju desa wisata, serta peran dari investor yaitu dengan sebagai penyedia modal.
6	(Sriyana & Raya, 2013) (https://inferensi.iainsalatiga.ac.id/index.php/inferensi/article/view/202)	Peran BMT dalam Mengatasi Kemiskinan di Kabupaten Bantul	Menurut penelitian ini Langkah BMT dalam mengurangi angka kemiskinan dengan cara melakukan kegiatan sosial ekonomi dengan Gerakan zakat, infaq dan waqaf. Selain itu BMT juga memberikan pinjaman modal usaha kepada masyarakat yang membutuhkan.
7	(Awwalunnisa, 2021) (https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/3283)	Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat	Pada penelitian ini mendeskripsikan bagaimana peran Lembaga Keuangan Syariah dalam membantu masyarakat miskin serta mengurangi angka kemiskinan dengan memberikan bantuan pendanaan serta pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dengan tidak menggunakan bunga. Hal tersebut karena selama ini pinjaman dengan mengenakan bunga sangat memberatkan masyarakat.
8	(Hafizd, 2020) (https://www.syekhnurjati.ac.id/jurn)	Peran Bank Syariah Mandiri (BSM) bagi Perekonomian	Peran Bank Syariah Mandiri terhadap ekonomi di masa pandemi meliputi

	<p>al/index.php/al-mustashfa/article/view/7402)</p>	<p>Indonesia di Masa Pandemi Covid-19</p>	<p>restrukturisasi pembiayaan nasabah yang terdampak pandemi COVID-19, pembagian bantuan sosial, pemaksimalan program <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR), menjaga protokol kesehatan dan pengalihan kegiatan bank menjadi berbasis digital.</p>
9	<p>(Yulyanah & Sarofah, 2019) (https://knia.stialanbandung.ac.id/index.php/knia/article/view/35)</p>	<p><i>Collaborative governance</i> Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir untuk Pengentasan Kemiskinan di Desa Kohod</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian ini menjelaskan tentang kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi dan daerah melalui program Kampung Sejahtera dalam rangka mengentaskan kemiskinan di Desa Kohod. output dari program ini adalah angka kemiskinan mampu ditekan dengan signifikan serta pemberdayaan masyarakat semakin meningkat.</p>
10	<p>(Salsabila & Sadayi, 2022) (https://forum.upbatam.ac.id/index.php/dialektikapublik/article/view/5452)</p>	<p><i>Collaborative governance</i> dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam <i>collaborative governance</i> terbagi menjadi dua yaitu <i>state actor</i> dan <i>Non-state actor</i>. Adapun hasil yang didapatkan dari kolaborasi ini yaitu membentuk ketahanan sosial masyarakat melalui pemberdayaan</p>

			sehingga mandiri secara ekonomi
--	--	--	---------------------------------

Berdasarkan *literatur review* yang sudah dideskripsikan diatas, terdapat 10 penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini yang berjudul Kolaborasi Pengentasan Kemiskinan melalui Program Gandeng Gendong di Kota Yogyakarta. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu sebelumnya yaitu penelitian ini lebih mengarah kepada bagaimana peran dari berbagai *stakeholders* yang terlibat dalam membantu dalam mengentaskan permasalahan kemiskinan di Kota Yogyakarta pada Program Gandeng-Gendong di Kota Yogyakarta. Selain itu, diantara penelitian terdahulu yang tercantum diatas banyak menggunakan teori Ansel and Gash, namun pada penelitian ini menggunakan teori (Roberts et al., 2016). Pada penelitian sebelumnya juga masih belum ditemukan bagaimana peran dari berbagai *stakeholders* dalam kolaborasi pemerintahan yang dilakukan pada Program Gandeng-Gendong. Sehingga penelitian ini akan memberikan gambaran tentang bagaimana *collaborative governance* menggunakan teori (Roberts et al., 2016) yang dilakukan untuk menekan angka kemiskinan di Kota Yogyakarta pada Program Gandeng-Gendong.

F. Kerangka Teori

1. Collaborative governance

A. Konsep Dasar dan Definisi *Collaborative governance*

Collaborative governance merupakan suatu pola pengaturan yang dibuat untuk meningkatkan keterlibatan lembaga formal maupun non-formal dalam membuat maupun melaksanakan kebijakan untuk memecahkan suatu

problematika yang terjadi (Ansell & Gash, 2008). Menurut penelitian (Chotimah et al., 2022) konsep dari *collaborative governance* harus melibatkan seluruh *stakeholders* karena sejatinya pemerintah memiliki keterbatasan dalam menangani permasalahan. Keterbatasan yang dimaksud adalah keterbatasan kemampuan, pengalaman, bahkan sumber daya maupun jaringan (Febrian, 2016). Oleh karena itu, perlu keterlibatan antara pihak korporasi dan masyarakat karena merekalah yang sering menemukan bahkan merasakan permasalahan tersebut.

Dalam *collaborative governance* lebih berfokus kepada kebijakan, resolusi maupun inovasi. Menurut dalam (Mulyana, 2023) menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan *collaborative governance* tidak hanya terbatas pada pemerintah dan non pemerintah, namun harus melibatkan sektor swasta, masyarakat dan LSM sehingga tersebut suatu kerja sama yang sinergi dari pemerintah-privat-sosial. Konsep yang dibangun oleh pemerintah melalui *collaborative governance* diharapkan mampu membawa Indonesia kepada negara yang maju dengan menemukan berbagai inovasi atas resolusi yang dihasilkan dalam menangani berbagai permasalahan (Sudirman et al., 2022).

Untuk memaksimalkan kolaborasi yang dilakukan perlu melibatkan aktor-aktor *stakeholders* yang berkepentingan sehingga dalam proses pelaksanaan hanya semata-mata berlandaskan pada kepentingan kolaborasi (Arif & Inayati, 2022). Pemimpin kolaborasi juga memiliki faktor penting menentukan arah serta keberhasilan dari kolaborasi yang ditetapkan. Sejatinya pemimpin memiliki peran yang sangat penting dalam kolaborasi karena memiliki

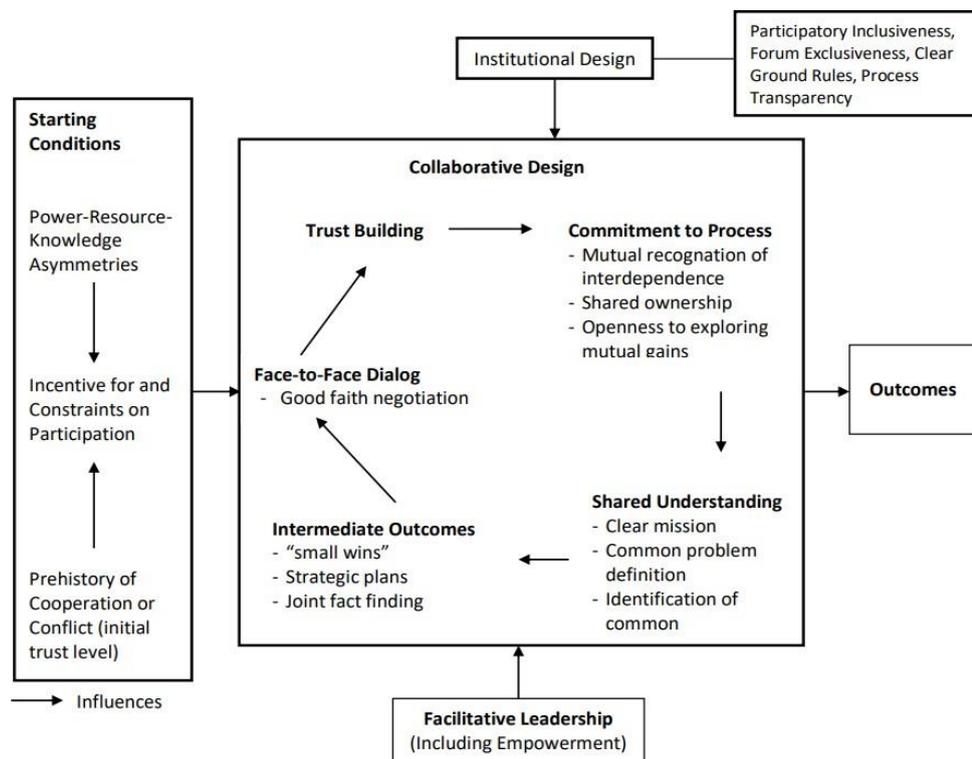
tanggung jawab yang besar terhadap visi yang telah ditetapkan pada kolaborasi tersebut. *Collaborative governance* tidak hanya dilakukan pada masalah publik saja, namun juga berkaitan pada isu-isu lingkungan hidup (Novita, 2018).

Definisi *collaborative governance* menurut (Ansell & Gash, 2008) adalah suatu bentuk susunan pemerintahan, dimana satu atau lebih instansi publik secara langsung berhubungan dengan *stakeholder* nonnegara dalam sebuah proses pengambilan keputusan yang formal, berorientasi pada konsensus, deliberatif dan menuju pada formulasi atau implementasi kebijakan publik, atau dapat pula dalam manajemen program atau asset publik. Konsep dan definisi tersebut banyak dijadikan acuan oleh akademisi lainnya dalam membahas *collaborative governance* hingga (Emerson & Balogh, 2012) menawarkan definisi yang lebih luas yaitu sebagai proses dan struktur dari pengambilan keputusan kebijakan publik dan manajemen yang melibatkan masyarakat secara konstruktif antar badan-badan publik, berbagai level pemerintahan dan atau pada ranah publik, privat dan sipil untuk melaksanakan suatu tujuan publik yang tidak dapat dicapai kecuali oleh forum bersama. Dengan kata lain kolaborasi membahas mengenai kerjasama dua tau lebih *stakeholder* untuk mengelola sumber daya yang sama yang sulit dicapai bila dilakukan secara individual.

Mengacu dari berbagai pengertian yang dijelaskan mengenai *collaborative governance*, dapat diterangkan bahwa pada dasarnya kebutuhan untuk berkolaborasi muncul dari hubungan saling ketergantungan yang terjalin antar pihak atau antar *stakeholders*. *Collaborative governance* dapat diterangkan

sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor *governance*. Melalui perspektif *collaborative governance*, tujuan-tujuan positif dari masing-masing pihak dapat tercapai (Irawan, 2017).

Model *Collaborative governance* menurut Ansell & Gash



Sumber : (Ansell & Gash, 2008)

Model *Collaborative governance* menurut (Ansell & Gash, 2008) terdiri atas beberapa tahap yaitu:

1. Dialog antar-muka (*face to face dialogue*)

Dialog tatap muka merupakan suatu komponen yang dibangun oleh para *stakeholders* yang terlibat dalam kolaborasi untuk membangun suatu kepercayaan, pemahaman bersama maupun komitmen serta

saling menghormati satu sama lain. Selain itu, dengan dialog antar muka juga mampu mengidentifikasi peluang demi keuntungan bersama.

2. Membangun kepercayaan (*mutuality building*)

Membangun kepercayaan merupakan keharusan yang dimiliki oleh setiap *stakeholders* untuk menjaga kerukunan dalam suatu kolaborasi. Kesolidan dalam kolaborasi harus benar-benar dijaga agar tujuan awal yang telah direncanakan mampu terealisasi dengan efektif.

3. Komitmen pada proses kolaborasi (*commitment to the process*)

Komitmen juga menjadi salah satu indikator terhadap keberhasilan maupun kegagalan dari kolaborasi yang dilakukan. Hal tersebut dikarenakan komitmen dari para *stakeholder* merupakan faktor terpenting dalam memfasilitasi kolaborasi. Menurut (Ansell & Gash, 2008) lemahnya suatu komitmen dari *stakeholders* sering kali dipandang sebagai permasalahan khusus.

4. Pemahaman bersama (*shared understanding*)

Pemahaman bersama didefinisikan sebagai suatu keselerasan dalam berpikir terhadap pemahaman dalam mencapai tujuan bersama pada kolaborasi agar tidak terjadi *miss communication*. Pemahaman bersama dapat diartikan sebagai *common mission* (misi umum), *common purpose* (tujuan umum), *common objectives* (obyektivitas umum), dan *shared vision* (visi bersama).

5. Dampak sementara (*intermediate outcomes*)

Dampak sementara merupakan suatu kemenangan kecil yang dapat menjadi masukan bagi proses kolaboratif, mendorong siklus positif dalam membangun kepercayaan dan komitmen. Meskipun hasil ini mungkin mewakili keluaran yang nyata, hal ini menunjukkan sebagai hasil proses penting yang penting untuk membangun momentum yang dapat menghasilkan kolaborasi yang sukses (Ansell & Gash, 2008).

Selain itu, model *Collaborative governance* menurut (Roberts et al., 2016) terdapat lima komponen indikator keberhasilan dari kolaborasi yaitu:

1. *Common purpose* (tujuan umum)

Kesepemahaman antar aktor *stakeholders* dalam mencapai tujuan bersama pada program yang dilaksanakan perlu keselarasan agar tercapai visi bersama. Mendahulukan tujuan pada komponen kolaborasi dikarenakan tujuan bersama memiliki arti penting untuk mempersatukan dan menjaga aktor-aktor yang terlibat dalam kolaborasi (Roberts et al., 2016).

2. *Mutuality* (mutualitas)

Manfaat penting dari kolaborasi bagi para aktor yaitu ketika dari masing masing aktor menyumbangkan berbagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan oleh pihak lain. Mutualitas sumber daya yang dimaksud bisa berupa informasi, pengetahuan bahkan materi (Roberts et al., 2016). Kesamaan dalam visi maupun komitmen terhadap tujuan kolaborasi membantu memfasilitasi keberhasilan pertukaran sumber daya.

3. *Enabling Environment* (lingkungan yang memungkinkan)

Salah satu faktor yang berpengaruh pada kinerja para aktor yaitu lingkungan kerja serta gaya kepemimpinan. Para pekerja akan bekerja dengan baik apabila didukung dengan lingkungan kerja yang baik (Ferawati, 2017). Selanjutnya ketepatan dalam sistem gaya kepemimpinan yang di terapkan mampu membawa pengaruh langsung terhadap keberhasilan untuk mencapai tujuan bersama (Asnawi, 1999).

4. *Trust* (kepercayaan)

Kepercayaan juga menjadi faktor penting terhadap keberhasilan kolaborasi karena dalam kolaborasi setiap aktor dituntut untuk mampu memegang komitmen yang sudah dibentuk bersama sehingga tidak mengeksploitasi aktor lain (Roberts et al., 2016).

5. *Spesific personal characteristics* (karakteristik pribadi tertentu)

Dalam suatu kerjasama, para aktor harus jujur dan berempati terhadap tujuan dan kepentingan satu sama lain. Para aktor *stakeholder* yang terlibat harus mampu menerapkan nilai keterbukaan untuk memahami motif dan kepentingan aktor lain (Roberts et al., 2016).

Kemudian pembagian *stakeholder* menurut (Clarkson, 1995) yaitu *stakeholder* kunci/utama (primer) dan sekunder. *Stakeholder* kunci adalah pihak yang partisipasinya sangat mempengaruhi kinerja organisasi, tanpa partisipasi dari *stakeholder* kunci, maka organisasi tidak dapat bertahan secara berkelanjutan. *Stakeholder* sekunder adalah kelompok *stakeholder* yang mempunyai pengaruh dan dipengaruhi oleh organisasi lain, tetapi tidak terlibat

dalam transaksi organisasi dan tidak terlalu penting dalam keberlangsungan hidup organisasi.

Sejalan dengan (Crosby, 1991) juga mengidentifikasikan pihak-pihak berdasarkan karakteristik para pihak, yaitu:

1. Para pihak utama (*primary stakeholder*), yaitu para pihak yang terkena dampak langsung baik 16 positif maupun negatif oleh suatu program atau proyek serta mempunyai kepentingan langsung dengan kegiatan tersebut;
2. Para pihak pendukung (*secondary stakeholder*), yaitu para pihak yang tidak memiliki kepentingan terhadap kegiatan tersebut memiliki kepedulian;
3. Para pihak kunci (*key stakeholder*), yaitu para pihak yang memiliki kewenangan legal dalam hal pengambilan keputusan.

B. Keberhasilan *Collaborative governance*

DeSeve (Moore, 2009) menyebutkan bahwa terdapat delapan item penting yang bisa dijadikan ukuran keberhasilan sebuah *Network* atau kolaborasi dalam *governance*, delapan item tersebut antara lain:

1. *Networked Structure* (struktur jaringan)

Menjelaskan tentang deskripsi konseptual suatu keterkaitan antara elemen yang satu dengan elemen yang lain yang menyatu secara bersama-sama yang mencerminkan unsur-unsur fisik dari jaringan yang ditangani. Kemudian, dalam pemerintahan kolaboratif, unsur jaringan tidak boleh membentuk hirarki yakni adanya kekuasaan dari salah satu

pihak. Sehingga dalam pemerintahan kolaboratif, jaringan harus bersifat organis dengan struktur jaringan yang terlibat yakni tidak ada hirarki kekuasaan, dominasi, dan monopoli. Jadi, semua pihak memiliki kesetaraan hak, kewajiban, tanggung jawab, otoritas, dan kesempatan untuk aksesibilitas dalam mencapai tujuan bersama.

2. *Commitment to a Common purpose* (Komitmen terhadap tujuan)

Commitment to a Common purpose merupakan alasan mengapa sebuah *network* atau jaringan harus ada yaitu karena perhatian dan komitmen untuk mencapai tujuan-tujuan positif yang dilakukan secara bersamasama. Tujuan-tujuan ini biasanya terdapat pada misi umum suatu organisasi pemerintah. Selain itu, komitmen yang terjalin tidak boleh memihak salah satu *stakeholders* atau pemangku kepentingan kebijakan. Karena ini mengartikan bahwa kolaborasi yang terjalin hanya menguntungkan salah satu pihak. Sehingga komitmen yang terjalin dalam pemerintah kolaboratif harus untuk kepentingan bersama melalui pencarian solusi bersama.

3. *Mutuality Among The Participants* (Kepercayaan)

Mutualityt Among The Participants merupakan hubungan profesional atau sosial, dan keyakinan bahwa para partisipasi mempercayakan pada informasi-informasi atau usaha-usaha dari *stakeholders* atau pemangku kepentingan lainnya dalam suatu jaringan untuk mencapai tujuan bersama. Sehingga dalam hal ini, setiap *stakeholders* harus saling percaya karena sebagai wujud dari hubungan

professional yang terjalin untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan pemerintahan kolaboratif.

4. *Governance*

Governance merupakan hubungan saling percaya diantara para aktor *governance* atau pemerintahan. Selain itu, ada aturan yang disepakati bersama dari setiap pemangku kepentingan, serta ada kebebasan 21 menentukan bagaimana kolaborasi dijalankan. Dalam hal ini, tata kelola pemerintahan dapat dikatakan *governance* apabila ada kejelasan siapa yang menjadi anggota dan siapa yang bukan termasuk anggota.

5. *Access to Authority* (Akses terhadap kekuasaan)

Access to Authority merupakan ketersediaan ukuran-ukuran atau ketentuan prosedur-prosedur yang jelas dan diterima secara luas. Jadi, sudah ada aturan kewenangan yang jelas dan diterima oleh masing-masing *stakeholders* untuk menjalankan peran sesuai kewenangannya.

6. *Distributive Accountability/Responsibility* (Pembagian Akuntabilitas)

Distributive Accountability/Responsibility merupakan penataan, pengelolaan, manajemen secara bersama-sama dengan *stakeholders* dan berbagi sejumlah pembuatan keputusan kepada seluruh anggota jaringan serta berbagi tanggung jawab untuk mencapai hasil yang diinginkan, Jadi dalam pemerintahan kolaboratif harus ada pembagian

tanggung jawab yang jelas, dan masing-masing *stakeholders* (termasuk masyarakat) harus terlibat dalam pembuatan keputusan kebijakan.

7. *Information Sharing* (Berbagi Informasi)

Information Sharing merupakan kemudahan akses bagi para anggota, perlindungan *privacy*, dan keterbatasan akses bagi yang bukan anggota selama bisa diterima oleh semua pihak. Sehingga dalam pemereintahan kolaboratif harus ada pembagian informasi yang jelas, dan kemudahan akses informasi bisa di dapat bagi masing-masing *stakeholders*.

8. *Access to Resources* (Akses terhadap Sumber Daya)

Access to Resources merupakan ketersediaan sumber keuangan, teknis, manusia dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk mencapai tujuan network. Jadi, harus ada kejelasan dan ketersediaan sumber daya bagi masing-masing *stakeholders* yang terlibat.

C. Model-Model *Collaborative*

Tata kelola kolaboratif merupakan mekanisme yang mempertemukan para pemangku kepentingan dari berbagai sektor untuk secara bersama menyusun dan mengimplementasikan suatu kebijakan (Hafel et al., 2021). Tujuan dari tata kelola kolaboratif adalah untuk meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memerintah, untuk memperkuat kepercayaan dan legitimasi dalam pemerintahan, dan untuk memperluas inklusi dalam desain dan implementasi kebijakan (Lahat et al., 2021). Kebijakan yang dimaksud merupakan kebijakan

yang berorientasi pada konsensus atau kepentingan publik (Ansell & Gash, 2008).

Dikarenakan banyak pihak yang terlibat dan, umumnya, permasalahan yang dihadapi berkenaan dengan hidup masyarakat luas, tata kelola kolaboratif memiliki tantangan dalam prosesnya yang kompleks, perencanaan yang matang, adanya transfer pengetahuan, dan komitmen serta tanggung jawab dari para aktor (Muhammad et al., 2017). Akan tetapi, terlepas dari hal tersebut, tata kelola kolaboratif telah menjadi pendekatan atau konsep yang dianut secara luas untuk mengatasi masalah publik yang kompleks (Agbodzakey et al., 2021).

Dalam implementasinya, tata kelola kolaboratif pun juga mengalami perkembangan, seperti kini dikenal adanya *triplehelix*, *Quadruplehelix*, *pentahelix*, dan *Quintuplehelix*. Model-model tersebut perlu dimaknai dan dipahami, terutama tentang apa yang membuatnya berbeda (O'Flynn & Wanna, 2008).

1. *Triplehelix*

Model *triplehelix*, yang dikenalkan oleh (Etzkowitz & Leydesdorff, 1995) pengenalan *triplehelix* didasari pada kondisi terpisahnya secara lembaga dan tugas antara industri/swasta, universitas/akademisi, dan pemerintah, yang sebenarnya ketiganya dapat bekerja sama dalam jalur dan tujuan yang sama, tanpa merugikan salah satu atau dua pihak. Industri/swasta memiliki peran dalam penciptaan inovasi, universitas/akademisi memiliki peran dalam penciptaan ilmu pengetahuan, dan pemerintah memiliki peran untuk menetapkan

kebijakan yang mendukung pelaksanaan peran-peran para aktor (Cai & Amaral, 2021)

Dalam referensi lain menyatakan bahwa berkaitan dengan *triplehelix*, (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000) memperkenalkan 3 (tiga) dimensi sistem sosial yaitu geografi, ekonomi dan pengetahuan. Tindakan utama atau yang bertanggung jawab dalam dimensi geografi adalah pemerintah yang menguasai wilayah, sedangkan untuk dimensi pengetahuan adalah akademisi yang menciptakan dan berbagi pengetahuan di dalam wilayah, dan pelaku yang bertanggung jawab dalam dimensi ekonomi adalah badan usaha yang menciptakan kegiatan ekonomi di dalamnya. Produk interaksi antar dimensi tersebut akan menciptakan infrastruktur pengetahuan, ekonomi politik, dan inovasi, yang dapat menjadi keunggulan kompetitif bagi wilayah.

2. *Quadruplehelix*

Model *triplehelix* berkembang pesat dan banyak diterapkan untuk menciptakan produk kebijakan atau program yang bermutu. Akan tetapi, seiring berkembangnya dinamika dalam implementasinya, model *triplehelix* juga mulai dikritik karena kekurangannya. Oleh karena itu, dikenalkan model baru *Quadruplehelix*, dengan menambahkan satu *helix* dalam kolaborasi, yaitu masyarakat yang berbasis pada media dan budaya (Carayannis & Campbell, 2009).

Penambahan masyarakat sebagai bagian dari tata kelola kolaborasi dimaksudkan untuk memperkuat perencanaan dan implementasi dari

kebijakan/program yang berorientasi pada masyarakat. Artinya, masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga terlibat sebagai subjek dalam merencanakan, mengimplementasikan, memantau, dan mengevaluasi. Hal tersebut dimaksudkan agar kebijakan/program yang dijalankan dapat tepat sasaran. Maka dari itu, jika *triplehelix* lebih menekankan pada konsep ekonomi pengetahuan, maka *Quadruplehelix* lebih menekankan pada konsep masyarakat pengetahuan (Carayannis & Campbell, 2009).

3. *Pentahelix*

Dalam perkembangan *helix* tata kelola kolaborasi, kembali muncul model baru yang memperkuat model 3 dan model 4 sebelumnya, yaitu *pentahelix* (Windiani, 2021). Terdapat satu *helix* yang melengkapi empat *helix* sebelumnya, yaitu media. Media berperan dalam penguatan publikasi perubahan sosial yang diupayakan oleh *helix* lainnya. Selain itu, fungsi media juga berkaitan dengan pembangunan brand image dari perubahan sosial tersebut, sehingga pihak lain di luar kolaborasi dapat mengakses informasi tentang perubahan sosial yang sedang dilakukan secara lebih mudah dan lengkap. Sinergi antar unsur *pentahelix* tersebut dapat menjadi kunci dari keberlangsungan dan keberlanjutan kebijakan atau program yang dijalankan untuk pengembangan masyarakat serta perubahan sosial masyarakat.

4. *Quintuplehelix*

Selain *pentahelix*, terdapat juga model yang melengkapi model 3 dan model 4, yaitu *Quintuplehelix* (Carayannis & Campbell, 2010). Model tersebut menambahkan lingkungan alam sebagai bagian tidak terpisahkan dalam tata kelola kolaborasi. Model *Quintuplehelix* bersifat interdisipliner dan transdisipliner pada saat yang sama karena kompleksitas struktur lima *helix* menyiratkan bahwa pemahaman analitis penuh dari semua *helix* memerlukan keterlibatan berkelanjutan dari seluruh spektrum disiplin, mulai dari ilmu alam hingga ilmu-ilmu sosial dan humaniora (Prasetyanti et al., 2020). *Quintuplehelix* juga bersifat transdisipliner, karena dapat digunakan sebagai kerangka acuan untuk pengambilan keputusan sehubungan dengan pengetahuan, inovasi, dan lingkungan (alami).

Sinergi *Quintuplehelix* sama-tidak sama dengan model *pentahelix*. Di satu sisi, kesamaannya terdapat pada tujuannya yaitu untuk keberlangsungan dan keberlanjutan upaya yang dilakukan. Di sisi lainnya, perbedaannya terletak pada fokusnya, yaitu *Quintuplehelix* berfokus pada kelestarian lingkungan (Carayannis & Campbell, 2010), sementara *pentahelix* berfokus pada keterbukaan dan kemudahan akses informasi (Windiani, 2021).

Penjelasan tentang perkembangan model dalam tata kelola kolaboratif menunjukkan bahwa semakin luas lingkup yang dikerjakan, maka semakin banyak juga pihak-pihak yang terlibat. Meskipun sifatnya adalah melengkapi,

tetapi dalam implementasinya, model *triplehelix*, *Quadruplehelix*, dan *pentahelix* serta *Quintuplehelix* dapat menjadi kerangka acuan dalam implementasi kerja sama sesuai besaran lingkungannya.

Model *triplehelix* dapat diimplementasikan dalam penciptaan inovasi di lingkup industri (berbasis pada ekonomi), model *Quadruplehelix* dapat diimplementasikan dalam penerapan inovasi di masyarakat atau umumnya disebut sebagai pengabdian masyarakat berbasis inovasi (berbasis pada sosial budaya), *pentahelix* dapat diterapkan dalam pengembangan dan publikasi inovasi (berbasis pada keberlanjutan dan demokrasi), dan *Quintuplehelix* dapat diterapkan dalam penciptaan, implementasi, dan pengembangan inovasi yang berbasis lingkungan.

D. Tahapan Dalam *Collaborative governance*

Untuk melaksanakan kolaborasi diperlukan beberapa tahapan. Menurut (Tampanguma et al., 2020) terdapat tiga tahap penting dalam kolaborasi yaitu:

1. Tahap I *Problem Setting*. *Problem setting* adalah upaya menentukan permasalahan, mengidentifikasi sumber sumber, dan membuat kesepakatan untuk melakukan kolaborasi dengan pihak lain.
2. Tahap II *Direction Setting*. Yaitu menentukan aturan dasar, menyusun agenda dan mengorganisasikan sub-sub kelompok. Menyatukan informasi yang ada, meneliti pilihan, dan memperbanyak persetujuan yang diinginkan.

3. Tahap III *Implementation*. Aturan dasar yang telah disepakati tersebut merupakan ketentuan yang telah disepakati sehingga dalam pelaksanaannya harus selalu dimonitor.

2. Kemiskinan

A. Pengertian Kemiskinan

Masalah kemiskinan kini menjadi penyakit bagi setiap negara berkembang seperti Indonesia saat ini. Kemiskinan berdampak kepada individu masyarakat Indonesia, namun dampak individu tersebut tidak hanya ditanggung oleh individu itu sendiri melainkan menjadi tanggung jawab seluruh *stakeholders* untuk mengatasi permasalahan tersebut (Armoyu, 2013). Menurut (Yacoub, 2012) kemiskinan merupakan suatu gambaran dimana seorang individu ataupun masyarakat memiliki pendapatan yang rendah sehingga terkendala dalam memenuhi kebutuhannya. Selain itu, kemiskinan juga berhubungan dengan terbatasnya lapangan pekerjaan sehingga menyebabkan terjadinya pengangguran serta tidak memadainya akses pendidikan dan kesehatan (Ferezagia, 2018).

Menurut (Wijaya, 2010) kemiskinan ditandai dengan ketidakmampuan seorang individu dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pada aspek primer (skill dan pengetahuan), dan sekunder (sosial, ekonomi, gizi, kesehatan dan pendidikan). Hal tersebut selaras dengan penelitian (Solikaton et al., 2018) yang menyatakan bahwa kemiskinan ditandai dengan kelangkaan suatu alat pemenuh kebutuhan dasar serta sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan juga membuat masyarakat di desa terpaksa berkerja sepanjang hari dengan upah yang relatif rendah (Prawoto, 2009). Perlu upaya-

upaya yang berkelanjutan (*sustainability*) untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang perlu dihilangkan dari hadapan bangsa Indonesia karena menimbulkan permasalahan sosial. Untuk itu perlu adanya upaya untuk melakukan pengentasan agar tidak terjadi keterbelakangan. Keterbelakangan yang dimaksud adalah dalam keterbelakangan dalam segi pembangunan fisik, SDM (sumber daya manusia) serta pembangunan ekonomi yang membuat suatu negara menjadi terhambat untuk menjadi maju (Istan, 2017). Individu yang terperangkap di dalam lubang hitam kemiskinan akan terus mewariskan kemiskinan tersebut kepada generasinya apabila tidak upaya untuk keluar dalam lingkaran tersebut (Rohima et al., 2013). Selain itu, dengan maraknya kemiskinan yang terjadi menimbulkan *problem* pada bidang sosial dengan tingkat kriminalitas yang tinggi seperti pencurian, pembunuhan serta kejahatan yang lainnya (Gopal et al., 2021).

B. Penyebab Kemiskinan

Menurut (Sharp et al., 1996) faktor penyebab terjadinya kemiskinan terbagi menjadi beberapa bagian yaitu:

1. Ketidaksamaan kepemilikan sumber daya

Kemiskinan ditandai dengan keterbatasan seorang individu dalam sumber daya yang dimiliki. Keterbatasan sumber daya bisa berupa dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Hal tersebut membuat ketimpangan dari segi pendapatan akibat adanya keterbatasan.

2. Kualitas sumber daya manusia

Rendahnya kualitas sumber daya manusia dipengaruhi oleh pendidikan, nasib kurang beruntung, adanya diskriminasi atau karena faktor keturunan. Kualitas sumber daya yang rendah berpengaruh pada rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas pada gilirannya berpengaruh pada upah yang rendah sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup.

3. Perbedaan akses dan modal

Keterbatasan sumber daya dan rendah produktivitas pada manusia menjadi alasan terjadinya kemiskinan. Namun hal tersebut masih menjadi permasalahan yang masih banyak di temukan dilingkungan sekitar. Penyebab kemiskinan yang sesungguhnya adalah tidak mempunyai uang yang cukup untuk modal. Dengan adanya modal permasalahan mengenai keterbatasan sumber daya akan mampu teratasi. Selain itu, dengan adanya akses modal mampu meningkatkan produktivitas.

C. Pengentasan Kemiskinan

Pada dahulu kala kemiskinan ditandai dengan kurangnya materi, sedangkan pada zaman modern ini kemiskinan ditandai dengan ketidakmampuan masyarakat dalam menikmati berbagai fasilitas seperti pendidikan, kesehatan, pelayanan publik dan lain sebagainya. Menurut (Huraerah, 2005) dalam penelitian (Itang, 2015) menyebutkan terdapat beberapa strategi dalam mengentaskan kemiskinan yaitu:

1. Karena kemiskinan bersifat *multi- dimensional*, maka program pengentasan kemiskinan seyogyanya juga tidak hanya

memprioritaskan aspek ekonomi tapi memperhatikan dimensi lain. Dengan kata lain, pemenuhan kebutuhan pokok memang perlu mendapat prioritas, namun juga harus mengejar target mengatasi kemiskinan nonekonomik. Strategi pengentasan kemiskinan hendaknya diarahkan untuk mengikis nilai-nilai budaya negatif seperti apatis, apolitis, fatalistik, ketidakberdayaan, dan sebagainya. Apabila budaya ini tidak dihilangkan, kemiskinan ekonomi akan sulit untuk ditanggulangi. Selain itu, langkah pengentasan kemiskinan yang efektif harus pula mengatasi hambatan- hambatan yang sifatnya struktural dan politis.

2. Untuk meningkatkan kemampuan dan mendorong produktivitas, strategi yang dipilih adalah peningkatan kemampuan dasar masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatan melalui langkah perbaikan kesehatan dan pendidikan, peningkatan keterampilan usaha, teknologi, perluasan jaringan kerja (*networking*), serta informasi pasar.
3. Melibatkan masyarakat miskin dalam keseluruhan proses penanggulangan kemiskinan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi, bahkan pada proses pengambilan keputusan.
4. Strategi pemberdayaan. Kelompok agrarian populism yang dipelopori kelompok pakar dan aktivis LSM, menegaskan, masyarakat miskin adalah kelompok yang mampu membangun

dirinya sendiri jika pemerintah mau memberi kebebasan bagi kelompok itu untuk mengatur dirinya.

D. Definisi Konseptual

1. Collaborative Governance

Collaborative governance adalah keterlibatan lembaga formal maupun non formal dalam menyikapi suatu problematika yang terjadi di daerah dalam wujud menciptakan suatu inovasi sebagai resolusi atas permasalahan yang terjadi. Kontribusi dari berbagai *stakeholders* sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dari *collaborative governance* tersebut. Indikator dari keberhasilan dari *collaborative governance* meliputi Tujuan Umum (*common purpose*), Mutualitas (*mutuality*), Lingkungan yang memungkinkan (*enabling environment*), Kepercayaan (*trust*), dan Karakteristik pribadi tertentu (*specific personal characteristics*).

2. Pengetasan kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu gambaran dimana seorang individu ataupun masyarakat memiliki pendapatan yang rendah sehingga terkendala dalam memenuhi kebutuhannya. Perlu upaya yang dilakukan pemerintah dalam bentuk pemangunan daerah melalui program program pengentasan kemiskinan. Dalam menyusun suatu program pengentasan kemiskinan perlu melibatkan masyarakat didalam nya mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Beberapa upaya yang dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan untuk harus dapat dirasakan oleh masyarakat dengan meningkatkan produktivitas masyarakat itu sendiri.

E. Definisi Operasional

Definisi Operasional

Variabel	Indikator	Parameter
Menjelaskan Kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di kota yogyakarta pada program gandeng-gendong	Tujuan Umum (<i>common purpose</i>)	- Perumusan visi dan tujuan bersama
	Mutualitas (<i>mutuality</i>)	- Pertukaran sumber daya seperti pengetahuan dan materi yang dihasilkan dari <i>stakeholders</i> terhadap program yang dijalankan
	Lingkungan yang memungkinkan (<i>enabling environment</i>)	- Konektivitas aktor <i>stakeholder</i> dalam kolaborasi
	Kepercayaan (<i>Trust</i>)	- Peningkatan kualitas kinerja <i>stakeholders</i>
	Karakteristik pribadi tertentu (<i>specific personal characteristics</i>)	- Memaksimalkan transparansi dan akuntabilitas aktor <i>stakeholders</i>

F. Kerangka berfikir



G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian yang berjudul “Kolaborasi Pengentasan Kemiskinan melalui Program Gandeng Gendong Tahun 2021-2023 di Kota Yogyakarta” menggunakan metode kualitatif. Menurut (Pertiwi et al., 2023) merupakan suatu kegiatan untuk menemukan jawaban dari permasalahan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan ilmiah sesuai dengan fokus penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Kota Yogyakarta sangat memerlukan adanya *collaborative governance* dari para *stakeholders* mengingat tingkat kemiskinan di kota tersebut sangat tinggi oleh karena itu perlu kerjasama dalam menurunkan angka kemiskinan di Kota Yogyakarta. Sehingga pada penelitian kualitatif ini akan melaksanakan penelitian di Kota Yogyakarta.

3. Jenis Data

Pada penelitian “Kolaborasi Pengentasan Kemiskinan melalui Program Gandeng Gendong Tahun 2021-2023 di Kota Yogyakarta” menggunakan beberapa sumber data yaitu data primer dan sekunder berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil langsung sesuai dengan keterangan aktor *stakeholder* berdasarkan keterangan langsung dari hasil wawancara dalam *collaborative governance* pada Program Gandeng-Gendong di Kota Yogyakarta. Pada penelitian ini, akan melakukan penelitian di beberapa *stakeholder* yang terlibat diantaranya Bappeda Kota Yogyakarta, Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY)

cabang Senopati, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Baznas Kota Yogyakarta, dan masyarakat Kelurahan Tegalpanggung yang menjadi salah satu aktor dalam kolaborasi dari Program Gandeng-Gendong.

Jenis Data	Data yang di Butuhkan	Sumber Data
Primer	Data kampus yang terlibat dalam Program Gandeng-Gendong	Bappeda Kota Yogyakarta
	Data korporasi yang terlibat dalam Program Gandeng Gendong	Bappeda Kota Yogyakarta
	Data dokumentasi kegiatan Program Gandeng Gendong	Bappeda Kota Yogyakarta
	Data dana CSR	BPD DIY Cabang Senopati

b. Data Sekunder

Pada penelitian ini menggunakan data sekunder berupa dokumen-dokumen relevan yang berkaitan dengan informasi mengenai program Gandeng-Gendong di Kota Yogyakarta. Adapun data-data yang dimaksud meliputi data dekskripsi wilayah penelitian, data kependudukan, data kemiskinan, dokumen program dan kegiatan Program Gandeng-Gendong dan Jurnal maupun media masa dari hasil publikasi.

Data Skunder

Jenis Data	Data yang di Butuhkan	Sumber Data
Sekunder	Data Deskripsi Wilayah	BPS Kota Yogyakarta
	Data Kependudukan	BPS Kota Yogyakarta
	Data Kemiskinan	BPS Kota Yogyakarta
	Artikel, Jurnal dan Media Massa yang berkaitan dengan informasi Program Gandeng-Gendong	Internet

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu metode yang dilakukan peneliti untuk mencari, memperoleh serta mendapatkan data untuk dijadikan sebagai sebuah pedoman dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang baik memiliki nilai kredibilitas yang tinggi. Selain menggunakan data sekunder dan primer untuk mendapatkan data, peneliti juga menggunakan teknik wawancara dan olah data melalui dokumentasi secara langsung kepada objek penelitian.

A. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses untuk menentukan hasil terhadap suatu penelitian. Menurut (Hansen, 2020) teknik wawancara digunakan untuk mengumpulkan data subyektif seperti opini, sikap dan perilaku narasumber terhadap suatu fenomena yang sedang di teliti. Wawancara merupakan salah satu unsur terpenting dalam penelitian kualitatif karena peneliti melakukan interaksi (*face to face*) secara langsung kepada narasumber dengan tatap muka sehingga data yang didapatkan menjadi akurat. Dalam tahap wawancara ini peneliti akan menggali informasi dengan beberapa aktor stakholder yang terlibat dalam kolaborasi pada Program Gandeng-Gendong. Selanjutnya hasil wawancara akan menjadi sumber untuk menjawab penelitian yang telah ditentukan. Adapaun beberapa stakholders yang menjadi narasumber pada penelitian ini sebagai berikut:

Sumber Data Wawancara

No	Narasumber	Nama Narasumber	Status Narasumber
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Kota Yogyakarta)	Bintang Prasajo, S.E., M.Ec.Dev	Ahli Pertama-Peneliti Bappeda Kota Yogyakarta
2	Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY) Cabang Senopati	Gusti Riza Rahman, M.Si.	Bidang Pemasaran Bisnis BPD DIY Cabang Senopati
3	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Prof. Dr. Dyah Mutiarin, M.Si.	Kepala Riset dan Inovasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
4	Baznas Kota Yogyakarta	Muhammad Fuad, SE	Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas Kota Yogyakarta
5	Masyarakat	Marsinah dan Risnawati	Masyarakat yang terlibat dalam Program Gandeng-Gendong

B. Dokumentasi

Pada teknik pengumpulan data selanjutnya peneliti menggunakan teknik dokumentasi dalam rangka dalam mencari maupun menemukan data melalui beberapa stranskip seperti buku, peraturan, notulen rapat dan sebagainya (Hasanah, 2017). Dokumentasi didefinisikan sebagai suatu catatan maupun gambar terhadap suatu kejadian yang telah terjadi sehingga dokumentasi dapat menampilkan data dan fakta untuk dijadikan pedoman dalam penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian kualitatif adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara mengurutkan, mengelompokkan maupun

mengkategorikan data yang diperoleh untuk menjawab suatu masalah dalam sebuah penelitian yang ingin dijawab (Saleh, 2016). Rangkaian kegiatan tersebut dapat disederhanakan agar mudah dipahami melalui beberapa tahap berikut:

A. Reduksi Data

Reduksi data dalam arti sempit adalah suatu proses mengurangi beberapa data, namun dalam arti luas adalah proses melakukan penyempurnaan data dengan memilah data yang relevan maupun tidak (Saleh, 2016). Data yang telah melalui proses reduksi merupakan data yang penting pada suatu penelitian.

B. Penyajian Data

Penyajian data adalah suatu proses atau kegiatan pengumpulan data informasi yang diatur dengan melakukan pengelompokan berdasarkan kategori yang telah ditentukan (Saleh, 2016). Tujuan dari penyajian data adalah untuk menyatukan data informasi agar bisa menggambarkan suatu fenomena yang sedang terjadi.

C. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat-padat dan mudah difahami, serta dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu, khususnya berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan dan perumusan masalah yang ada. Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul

cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir (Saleh, 2016).